



**PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU**

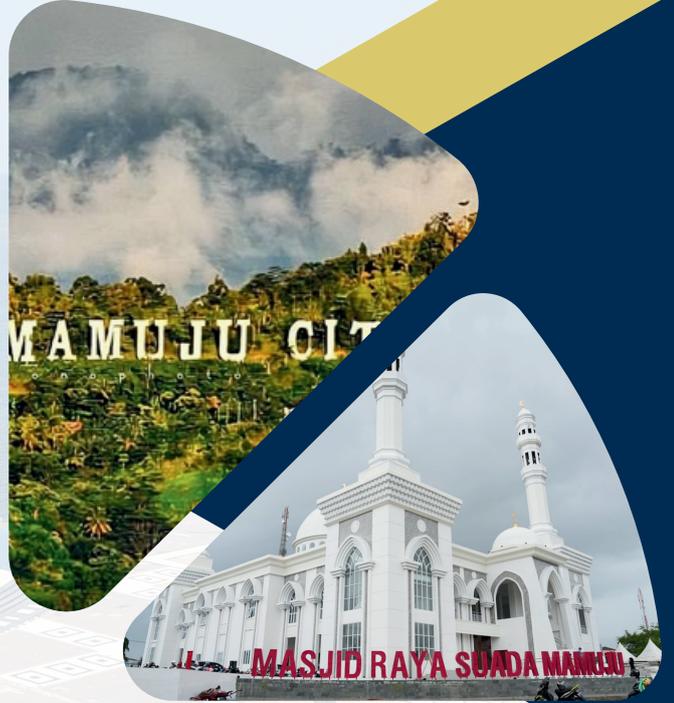
2024 RLPPD

**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah**

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah dokumen yang memuat informasi singkat mengenai capaian kinerja pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran.

 www.mamujukab.go.id

 (0426) 2324500



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH
(RLPPD) KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2024**

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO :

Ukuran dari kemajuan proses pembangunan daerah saat ini didekati dengan beberapa faktor. Determinan yang sering digunakan diantaranya angka capaian kinerja makro. Data-data tersebut menggambarkan sejauh mana perkembangan keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ukuran capaian kinerja makro merupakan representasi hasil dari berbagai Program yang sudah diselenggarakan oleh pemerintahan daerah maupun pusat, serta swasta dan pihak terkait lainnya dalam Pembangunan Nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,07	71,86	1,11
2	Angka Kemiskinan	7,57	7,15	-5,55
3	Angka Pengangguran	2,99	2,77	-7,94
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,37	6,47	48,05
5	PDRB Perkapita/ Tahun (Juta Rupiah)	49,18	53,92	9,64
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,372	0,425	14,247

Capaian Kinerja Makro adalah ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang mencerminkan dampak kebijakan dan program pemerintah. Indikator utama mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

Pada 2024, IPM Kabupaten Mamuju meningkat menjadi 71,86 (kategori sedang). Tingkat kemiskinan menurun menjadi 7,15%, didukung oleh pemulihan ekonomi dan program sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 2,77%, dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,47%, dengan sektor utama pertambangan, jasa kesehatan, dan pengadaan listrik. PDRB per kapita meningkat menjadi Rp 53,92 juta, meskipun distribusi pendapatan masih perlu diperbaiki. Indeks Gini

naik menjadi 0,425, menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan.

Secara keseluruhan, Kabupaten Mamuju mengalami kemajuan ekonomi dan sosial, meski masih menghadapi tantangan dalam pemerataan kesejahteraan.

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk diantaranya :

2.1. Urusan Pendidikan

2.1.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	75,83	89,25
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	105,05	98,84
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	85,31	81,11
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	98,28	42,41

2.1.2. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tahun 2024 sebesar Rp. 122,732,579,655 dan serapan anggaran sebesar 85.56 % dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan, Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) dan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD).

- 2) Program SPM Pendidikan Dasar dengan kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B), Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B), Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) dan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B).
- 3) Program Pendidikan Kesetaraan dengan kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan), Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan),

2.1.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usai Dini

- a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 sd 6 tahun Dengan target 100% dengan capaian relaisasi sebesar % adapun masalah yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan Akses di Pedesaan: Di daerah pedesaan, angka partisipasi PAUD cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jarak tempuh yang jauh, kurangnya fasilitas transportasi, dan keterbatasan informasi tentang pentingnya pendidikan usia dini
- Kurangnya Kesadaran Orang Tua: Banyak orang tua yang kurang memahami manfaat pendidikan usia dini bagi perkembangan anak. Hal ini menyebabkan partisipasi anak- anak dalam PAUD menjadi rendah
- Kualitas Layanan yang Tidak Merata: Kualitas layanan PAUD tidak merata di seluruh Indonesia. Ada daerah yang memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas tinggi, sedangkan ada juga daerah yang masih memerlukan peningkatan kualitas layanan
- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga pengajar, dan fasilitas pendukung dapat menghambat peningkatan angka partisipasi PAUD

Adapaun solusi yang akan dilaksanakan berupa :

- Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan kesadaran orang tua dan

masyarakat akan pentingnya PAUD melalui kampanye, seminar, dan media sosial.

- Pelatihan Guru: Memberikan pelatihan kepada guru PAUD agar mereka lebih kompeten dan kreatif dalam mengajar
- Subsidi Pendidikan: Memberikan bantuan biaya atau subsidi pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
- Fasilitas dan Infrastruktur: Meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur PAUD agar lebih menarik dan nyaman bagi anak-anak
- Kerjasama dengan Lembaga: Melibatkan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dalam program-program yang mendukung PAUD

b. Jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B

Jumlah satuan pendidikan PAUD yang telah terakreditasi minimal B dengan target 27.33 % dengan capaian 28.12 %. Walaupun target tercapai pada tahun 2024 masih ada beberapa yang menjadi tantangan dan hambatan sehingga tahun berikutnya akan menjadi bahan evaluasi seperti :

- Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan terlatih masih menjadi tantangan. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan diperlukan
- Kualitas Pengelolaan Satuan PAUD: Pengelolaan satuan PAUD yang kurang efisien dan kurang terstruktur dapat menghambat pencapaian akreditasi yang diinginkan. Peningkatan manajemen dan administrasi yang baik sangat diperlukan
- Akses dan Pemerataan Layanan: Pemerataan akses dan kualitas layanan PAUD masih menjadi masalah di beberapa daerah. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai perlu diperhatikan
- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya finansial dan material juga menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas PAUD. Diperlukan dukungan finansial yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan peningkatan mutu.

Adapun solusi yang akan dilaksanakan berupa :

- Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Melakukan pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - Peningkatan Proses Pembelajaran: Menggunakan metode pengajaran yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di satuan PAUD.
 - Pengelolaan yang Efisien: Meningkatkan manajemen dan administrasi satuan PAUD agar lebih terstruktur dan efisien
 - Dukungan Sumber Daya: Memastikan dukungan finansial yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan peningkatan mutu di satuan PAUD
 - Evaluasi dan Monitoring: Melakukan evaluasi diri internal secara berkala dan memonitor kinerja satuan PAUD untuk memastikan kualitas layanan yang terus meningkat
- c. Proporsi jumlah guru PAUD kualifikasi S1/D4

Jumlah pendidik PAUD dengan kualifikasi Pendidikan D4/S1 target pada tahun 2024 sebesar 52.87 % dengan capaian 52.29 % yang menjadi tantangan dan hambatan sehingga tahun berikutnya akan menjadi bahan evaluasi seperti :

- Ketersediaan Calon Guru: Kurangnya jumlah lulusan S1 atau D4 yang memilih karir sebagai guru PAUD menjadi hambatan utama. Banyak calon guru yang lebih memilih karir di luar bidang pendidikan
- Kompensasi dan Karir: Kompensasi yang diterima oleh guru PAUD sering kali lebih rendah dibandingkan dengan profesi lain, sehingga menurunkan daya tarik calon baru. Peningkatan kompensasi dan peluang karir yang lebih baik dapat menjadi solusi
- Pengembangan Profesional: Guru PAUD memerlukan pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Program pelatihan dan pengembangan yang efektif perlu diterapkan secara terus- menerus.
- Perubahan Sosial dan Teknologi: Perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang cepat juga menjadi tantangan
- dalam menghasilkan guru PAUD yang mampu menghadapi

dinamika zaman

2. Pendidikan Dasar

- a. Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan usia dari 7 sd 15 tahun anatar lain jenjang pendidikan dasar usia 7 sd 12 tahun dan jenjangn pendidikan SMP usia 13 sd 15 tahun
- b. Angka partisiapsi sekolah usia 7 sd 15 tahun adalah target tahun 2024 sebesar 100 % dengan capaian indiaktor sebesar 93.84 %. Hal ini disebabkan antara lain :
 - Akses ke Pendidikan: Di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil atau terpinggirkan, akses ke sekolah masih menjadi masalah. Anak-anak mungkin harus menempuh jarak yang jauh atau menghadapi kendala transportasi
 - Kualitas Guru: Ketersediaan guru yang kompeten dan berkualitas masih menjadi tantangan. Banyak guru yang belum memiliki kualifikasi atau pelatihan yang memadai untuk mengajar sesuai standar yang diharapkan
 - Sarana dan Prasarana: Kondisi sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, seperti ruang kelas yang kurang, fasilitas sanitasi yang buruk, dan keterbatasan alat pembelajaran, dapat menghambat proses belajar mengajar
 - Kurangnya Dukungan Keluarga: Dukungan dari keluarga sangat penting dalam pendidikan anak. Namun, beberapa keluarga mungkin tidak memberikan perhatian yang cukup pada pendidikan anak-anak mereka karena berbagai alasan, seperti kesibukan kerja atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan
 - Perubahan Teknologi dan Sosial: Perkembangan teknologi yang pesat membawa tantangan baru bagi pendidikan, seperti adaptasi terhadap metode pembelajaran digital. Selain itu, perubahan sosial juga memengaruhi lingkungan belajar anak.
 - Kesehatan dan Gizi: Kondisi kesehatan dan gizi anak-anak juga memengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dengan baik. Masalah kesehatan atau kekurangan gizi dapat menghambat perkembangan kognitif dan fisik anakAdapaun solusi yang akan dilaksanakan berupa :

- Peningkatan Akses ke Pendidikan berupa
 - Pembangunan Infrastruktur: Membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil dan menyediakan transportasi yang memadai bagi siswa
 - Peningkatan Kualitas Guru berupa Pelatihan dan Pengembangan Profesional seperti Mengadakan pelatihan berkala bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka. Rekrutmen Guru Berkualitas Menarik lulusan berkualitas untuk menjadi guru dengan menawarkan kompensasi yang kompetitif.
 - Dukungan Keluarga berupa Menyediakan program yang mengedukasi orang tua tentang pentingnya pendidikan dan cara mendukung anak-anak mereka dan mendorong komunikasi yang aktif antara sekolah dan keluarga untuk mendukung perkembangan anak
 - Pemanfaatan Teknologi berupa Pembelajaran Daring: Menerapkan sistem pembelajaran daring untuk melengkapi pembelajaran tatap muka dan Aplikasi Pembelajaran: Menggunakan aplikasi dan platform pembelajaran digital untuk meningkatkan interaksi dan akses informasi.
- c. Skor Kemampuan Literasi SD dan SMP
1. Kemampuan literasi SD secara umum dengan target sebesar 48.20 % dengan capaian realisasi 58.82 %
 2. Kemampuan literasi SMP secara umum dengan target sebesar 60.48 % dengan capaian realisasi 49.52 %.
- Kemampuan literasi SMP masih dikategorikan rendah jika dilihat dari target nasional untuk kabupaten yang hanya sekitar 49.52 % dari target 60.48 % adapun yang menjadi hambatan dan tantangan antara lain :
- Akses Terhadap Buku dan Bahan Bacaan
- Kurangnya Perpustakaan seperti Banyak sekolah yang tidak memiliki perpustakaan atau koleksi buku yang memadai dan Harga Buku: Harga buku yang tinggi sering kali menjadi kendala bagi keluarga untuk membeli bahan bacaan tambahan.
- Kualitas Pengajaran
- Metode Pengajaran yang kurang menarik dan monoton dapat

membuat siswa kurang tertarik untuk belajar

membaca dan menulis dan Keterampilan Guru: Tidak semua guru memiliki keterampilan yang memadai dalam mengajar literasi, terutama di daerah-daerah terpencil

- Motivasi Siswa

Kurangnya Minat Baca: Beberapa siswa memiliki minat baca yang rendah, yang bisa disebabkan oleh kurangnya paparan terhadap kegiatan membaca sejak dini dan Kondisi Sosial-Ekonomi: Siswa dari keluarga dengan kondisi sosial- ekonomi rendah mungkin kurang mendapatkan dukungan untuk mengembangkan keterampilan literasi.

- Lingkungan Belajar

Kondisi Kelas: Ruang kelas yang kurang kondusif, seperti terlalu ramai atau tidak nyaman, dapat mengganggu konsentrasi siswa dan Teknologi: Meskipun teknologi dapat menjadi alat bantu yang efektif, penggunaan yang tidak tepat atau kurangnya akses terhadap teknologi juga bisa menjadi hambatan.

- Pengaruh Sosial dan Budaya:

Budaya Membaca: Kurangnya budaya membaca di lingkungan sosial siswa dapat mempengaruhi minat dan kemampuan literasi mereka

Adapun solusi yang akan dilaksanakan berupa :

- Meningkatkan Akses Terhadap Buku

Membangun dan memperbaiki perpustakaan sekolah

- Peningkatan Kualitas Pengajaran

Memberikan pelatihan kepada guru untuk mengembangkan metode pengajaran literasi yang menarik dan efektif dan Menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual

- Meningkatkan motifasi siswa

Mengadakan kegiatan yang mendorong minat baca, seperti lomba membaca atau klub literasi

Memberikan pelatihan kepada guru untuk mengembangkan metode pengajaran literasi yang menarik dan efektif Memberikan dukungan

dan motivasi dari orang tua dan komunitas.

- Menciptakan Lingkungan Belajar yang Kondusif

Menyediakan ruang kelas yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran Memanfaatkan teknologi secara efektif untuk mendukung literasi

- Membangun Budaya Membaca

Mendorong budaya membaca di lingkungan sekolah dan Masyarakat Menyediakan akses terhadap bahan bacaan dalam bahasa ibu dan bahasa pengantar.

d. Skor Kemampuan Numerasi SD dan SMP

1. Kemampuan numerasi SD secara umum dengan target sebesar 35.89 % dengan capaian realisasi 52.78 %
2. Kemampuan numerasi SMP secara umum dengan target sebesar 59.36 % dengan capaian realisasi 49.70 %.

Kemampuan numerasi SMP masih dikategorikan rendah jika dilihat dari target nasional untuk kabupaten adapapun yang menjadi hambatan dan tantangan antara lain :

- Materi yang tidak aplikatif untuk kehidupan sehari-hari
- Kurangnya minat siswa terhadap matematika
- Kurangnya latihan soal berbasis numerasi
- Kurangnya pemahaman guru tentang konsep numerasi Adapapun solusi yang akan dilaksanakan berupa :
- Meningkatkan akses siswa terhadap bahan bacaan yang berkualitas
- Menegembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kehidupan sehari hari
- Memeberikan pelatihan yang berkelanjutan dengan guru
- Memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pembelajaran matematika
- Meningkatkan dukungan orang tua dalam pemebelajaran numerasi
- Melakukan program bimbingan

e. Skor Iklim Inklusivitas SD dan SMP

Kontribusi skor Iklim Inklusivitas berdasarkan data rapor

pendidikan antara lain :

1. skor Iklim Inklusivitas SD secara umum dengan target sebesar 59.53 % dengan capaian realisasi 54.67 %
2. skor Iklim Inklusivitas SMP secara umum dengan target sebesar 60.57 dengan capaian relaisasi 53.77 %.

Kemampuan Inklusivitas SD dan SMP masih dikategorikan rendah jika dilihat dari target nasional untuk kabupaten adapaun yang menjadi hambatan dan tantangan antara lain :

- Keterbatasan Fasilitas: Banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus
- Keterbatasan Fasilitas: Banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus
- Stigma dan Diskriminasi: Siswa dengan kebutuhan khusus atau latar belakang yang berbeda sering menghadapi stigma dan diskriminasi, baik dari teman sekelas maupun dari staf sekolah.
- Keterbatasan Kurikulum: Kurikulum yang ada seringkali tidak fleksibel atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang beragam, sehingga sulit untuk mencapai inklusivitas penuh

Adapaun solusi yang akan dilaksanakan berupa :

- Pelatihan Guru

Pelatihan Berkelanjutan: Menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk guru agar mereka dapat mengelola kelas yang inklusif dan memahami berbagai kebutuhan siswa.

Teknik Mengajar Inklusif: Mengajarkan teknik-teknik mengajar inklusif yang memungkinkan semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar.

- Fasilitas dan Akomodasi

Infrastruktur yang Ramah: Membangun dan memperbaiki fasilitas sekolah agar lebih ramah bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus

Teknologi Pendukung: Menggunakan teknologi yang dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus untuk belajar lebih efektif, seperti perangkat lunak bantu atau

alat pembelajaran digital.

- Kesadaran dan Pendidikan Karakter

Program Kesadaran: Mengadakan program kesadaran dan pelatihan tentang pentingnya inklusivitas bagi siswa, guru, dan orang tua

Pendidikan Karakter: Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum untuk membangun sikap saling menghargai, empati, dan toleransi di antara siswa.

f. Iklim Keamanan SD dan SMP

Kontribusi skor Iklim Keamanan berdasarkan data rapor pendidikan antara lain :

1. skor Iklim keamanan SD secara umum dengan target sebesar 71.33 % dengan capaian realisasi 72.53 %
2. skor Iklim keamanan SMP secara umum dengan target sebesar 70.88 % dengan capaian relaisasi 67.12 % Kemampuan kemandirian SMP masih dikategorikan rendah jika dilihat dari target nasional untuk kabupaten adapaun yang menjadi hambatan dan tantangan antara lain :

- Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan

Guru dan staf mungkin kurang memahami pentingnya keamanan sekolah atau belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menghadapi situasi darurat.

- Infrastruktur yang Tidak Memadai

Banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas fisik yang mendukung keamanan, seperti pagar, CCTV, atau sistem alarm.

- Kejadian Bullying dan Kekerasan

Kekerasan dan perundungan (bullying) dapat mengancam keamanan siswa dan menciptakan lingkungan yang tidak nyaman.

- Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan Mental

Siswa yang mengalami masalah emosional atau mental mungkin tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan karena terbatasnya akses ke layanan kesehatan mental.

Adapaun solusi yang akan dilaksanakan berupa :

- Pelatihan dan Pengembangan Profesional Guru Pelatihan Berkala:

Mengadakan pelatihan berkala bagi guru untuk meningkatkan pemahaman tentang inklusivitas dan strategi pengajaran yang inklusif

Pengembangan Modul Inklusif: Mengembangkan modul pelatihan yang mencakup teknik mengelola kelas yang beragam dan menangani kebutuhan khusus siswa

- Fasilitas dan Teknologi

Infrastruktur Ramah Disabilitas: Membangun fasilitas fisik yang ramah disabilitas, seperti ramp dan lift, serta toilet yang aksesibel.

Alat Bantu Pembelajaran: Menggunakan teknologi dan alat bantu pembelajaran seperti perangkat lunak pembaca layar untuk siswa dengan keterbatasan penglihatan

- Kebijakan Sekolah

Kebijakan Anti-Diskriminasi: Mengembangkan dan menerapkan kebijakan anti-diskriminasi yang jelas dan tegas, serta mekanisme pelaporan yang aman
Penerimaan Terbuka: Memastikan proses penerimaan siswa terbuka untuk semua, tanpa memandang latar belakang atau kebutuhan khusus

- Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas

Program Kemitraan: Membentuk kemitraan dengan orang tua dan komunitas untuk mendukung inklusivitas, seperti mengadakan pertemuan rutin dan program kolaboratif

Edukasi Orang Tua: Memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya inklusivitas dan cara mendukung anak-anak mereka di rumah.

- Pendidikan Karakter dan Kesadaran Sosial

Program Pendidikan Karakter: Mengintegrasikan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam program pendidikan karakter.

Kegiatan Kesadaran Sosial: Mengadakan kegiatan yang meningkatkan kesadaran sosial, seperti proyek layanan masyarakat atau diskusi kelas tentang inklusivitas.

- Dukungan Psikososial

Layanan Konseling: Menyediakan layanan konseling bagi siswa yang membutuhkan dukungan emosional dan psikologis

Pendampingan Khusus: Menyediakan pendamping atau asisten khusus bagi siswa dengan kebutuhan khusus untuk membantu mereka dalam proses belajar

- Iklim Kebinekaan SD dan SMP

Kontribusi skor Iklim Kebinekaan berdasarkan data rapor pendidikan antara lain :

1. skor Iklim Kebinekaan SD secara umum dengan target sebesar 71.09 % dengan capaian realisasi 71.54 %
2. skor Iklim Kebinekaan SMP secara umum dengan target sebesar 69.62 % dengan capaian relaisasi 51.96% Walaupun target capaian tercapai namun tetpa menjadi bahan evaluasi kedepanya untuk mengatasi hambatan dan tantangan antara lain :

- Stereotip dan Prasangka: Adanya stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok tertentu dapat menghambat terciptanya kebinekaan

- Lingkungan Sosial: Lingkungan sosial di luar sekolah yang kurang mendukung nilai-nilai kebinekaan juga dapat mempengaruhi siswa

3. Kesetaraan usia 7 sd 18 tahun

Angka partisipasi sekolah usia 7 sd 18 tahun kesetaraan dengan target 100 % dengan capaian 22.89 %. Ada beberapa factor yang mempengaruhi masih rendahnya APS kesetaraan in antara alian :

- Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan

Minimnya Pendidikan Kesetaraan: Banyak individu yang kurang mendapatkan pendidikan mengenai pentingnya kesetaraan gender, etnis, agama, dan lain-lain

Stereotip dan Prasangka: Adanya stereotip dan prasangka yang diwariskan dari generasi ke generasi bisa menjadi penghalang bagi partisipasi yang setara

- Budaya dan Norma Sosial

Norma Tradisional: Norma tradisional dan budaya patriarki masih kuat di beberapa masyarakat, membatasi peran dan partisipasi kelompok tertentu

Tekanan Sosial: Tekanan sosial untuk mematuhi norma- norma yang ada dapat menghambat individu untuk berpartisipasi secara setara

- Hambatan Ekonomi

Ketidaksetaraan Ekonomi: Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi sering kali menghambat partisipasi kesetaraan, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung

Beban Kerja Ganda: Beban kerja ganda, terutama pada wanita yang harus bekerja sekaligus mengurus rumah tangga, dapat menghambat partisipasi mereka

- Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan yang Tidak Merata: Ketidakmerataan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas dapat menghambat partisipasi kesetaraan

Kurangnya Pelatihan dan Kesempatan: Kurangnya pelatihan dan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan

- Kurangnya Peran Model:

Ketidakhadiran Role Model yaitu Kurangnya figur atau role model yang berhasil dalam mencapai kesetaraan dapat mengurangi motivasi individu untuk berpartisipasi

2.2. Urusan Kesehatan

2.2.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2,75	2,79
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	89,24	95,26
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	96,46	95,62
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,63	98,55
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	87,07	81,27
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83,64	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	78,81	84,91
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88,92	90,84
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	99,69
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	82	89,38
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90,75	95,61

2.2.2. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebesar Rp. 14,686,467,170 dan serapan anggaran sebesar 91.20 %

dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2.2.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

- Penentuan sasaran Rill belum bisa dilakukan di n-1
- Besarnya jumlah sasaran usia Balita dan usia produktif
- Belum adanya Surat Keputusan Bupati terkait penentuan sasaran SPM
- Masih adanya data pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Klinik kesehatan, dan tempat praktek Dokter swasta dalam bentuk jumlah/ angka.

b. Penghitungan kebutuhan

- Penghitungan kebutuhan pemenuhan mutu (barang/jasa/SDM) SPM belum dilakukan pada n-1 dan dan dan belum memfokuskan pada pemenuhan semua standar pelayanan yang ada di setiap indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam pemenuhan barang dan jasa sesuai standar dalam penyelenggraan SPM Kesehatan.

c. Perencanaan dan Penganggaran

- Belum semua Puskesmas melaksanakan perencanaan dengan melakukan identifikasi masalah berdasarkan skala prioritas isu permasalahan yang harus diselesaikan
- Alokasi anggaran di sektor kesehatan belum mampu mengakomodir semua standar mutu SPM Kesehatan.

d. Pelaksanaan

- Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin disarana pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Posyandu.
- Ketersediaan Alat dan bahan sesuai standar pelaksanaan pelayanan SPM Kesehatan yang belum cukup seperti (ODGJ Kit) dan Bahan dukung pelayanan kesehatan lainnya (Media KIE, rapor kesehatan

- anak sekolah, Buku kesehatan lansia, Strip pemeriksaan kolesterol).
- Pengobatan yang belum sesuai standar/tidak rutin karena masih kurangnya kepatuhan dan pendampingan minum obat khususnya bagi penderita PTM (Hipertensi dan ODGJ Berat)
 - Masih adanya beberapa daerah sulit, jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan mengakibatkan masyarakat belum bisa mendapatkan pelayanan sesuai standar, seperti pelayanan Ibu hamil (6 kali) selama masa kehamilan, persalinan yang di luar fasilitas kesehatan karena keterlambatan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan/puskesmas.
 - Adanya beban ganda bagi beberapa pemegang program seperti pelaksana Penyakit Tidak Menular, Nutrisionis, dan Tenaga penyuluh di beberapa puskesmas karena jumlah tenaga yang masih kurang.
 - Kurangnya jumlah Tenaga Dokter/Dokter Gigi Puskesmas mengakibatkan adanya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar.
 - Belum optimalnya koordinasi lintas program dalam penyelenggaraan pelayanan indikator SPM kesehatan
 - Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor khususnya pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pemenuhan standar mutu (barang/jasa) SPM Kesehatan.
 - Masih minimnya kegiatan pelatihan bagi tenaga Non kesehatan (kader, Guru UKS, Dokter kecil).

2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	43,31	43,30568
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	71,76	72,0214
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,05	73,47603
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	43,77	36,60801
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	100
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100

2.3.2. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Mamuju Tahun 2024 sebesar Rp. 19,072,871,781 dan serapan anggaran sebesar 94.39% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang di hadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju dalam pencapaian pelayanan SPM urusan pekerjaan umum antara lain :

- a. Belum maksimalnya serapan anggaran yang di karenakan keterlambatan lelang sehingga pekerjaan fisik di lapangan mengalami keterlambatan, dan masuk ke dana luncturan tahun 2025 solusinya mempercepat jadwal lelang sehingga waktu pengerjaan bisa sesuai dengan target yang diharapkan
- b. Belum adanya kelembagaan (UPTD) yang terbentuk khusus penanganan air limbah dan IPLT belum berfungsi sehingga pengolahan air limbah belum bisa di laksanakan secara maksimal

2.4. Urusan Perumahan dan Permukiman

2.4.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Permukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	36,44
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0,80	3,38
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	20,84	20,43
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,78	2,81

2.4.2. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Mamuju Tahun 2024 sebesar Rp. 2,814,325,660 dan serapan anggaran sebesar 93.58 % dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

2.4.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Dari sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju masih memiliki permasalahan yaitu:

Keterbatasan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju khususnya pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju menyebabkan kurangnya Capaian Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana. Keterbatasan jumlah personil dan kurangnya sumber daya manusia yang memahami terkait pelaksanaan pemenuhan SPM juga merupakan salah satu penyebab kurang maksimalnya pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten Mamuju

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Mamuju sedikit terbantu dengan adanya koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga pemenuhan SPM dapat di laksanakan.

2.5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.5.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11	11,83

2.5.2. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2024 melaksanakan 3 program dan 8 kegiatan. 1 Program Rutin dengan 5 Kegiatan, dan 2 Program Teknis dengan 3 Kegiatan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. sebesar Rp. 11,363.047.292,- (sebelas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah). dan terealisasi sebesar Rp. 11.063.433.598,- (sebelas milyar enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 97,36% dari Total Anggaran. Anggaran ini diperuntukkan untuk 3 (tiga) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan.

Dari alokasi anggaran Tahun 2024: sebesar Rp. 6.873.491.140,- di gunakan untuk kegiatan rutin dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.615.658.518,- atau 98,53 %.; sebesar Rp. 4.489.556.152,- digunakan untuk kegiatan teknis dengan Realisasi anggaran sebesar Rp.4.447.775.080,- atau 99,07 %.:

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum) dengan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penegakan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar) dengan kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Pagu anggaran yang di gelontorkan Pemerintah Kabupaten Mamuju pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 dengan melaksanakan 1 Program 4 Kegiatan dengan 8 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.469.230.922,- yang terdiri dari dan teralisasi sebesar Rp. 501.732.652,- atau sebesar 34, 13 %.

- 3) Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan) dengan Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

2.5.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Ada Beberapa Indikator SPM Bidang Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang tidak mendapatkan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan/ program sehingga target tidak tercapai.
- Keterbatasan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju khususnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju menyebabkan kurangnya Capaian Pelayanan pencegahan dan penanganan korban bencana.

-

2.6. Urusan Sosial

2.6.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	98,38
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100

2.6.2. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Pagu anggaran yang di gelontarkan pemerintah kabupaten mamuju pada dinas sosial kabupaten mamuju pada tahun 2024 melaksanakan 5 program dan 7 kegiatan rutin dan 5 kegiatan tekhnis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.235.577.713 Dan realisasi sebesar Rp. 4.183.315.561 Atau terealisasi sebesar 98,76%. dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

2.6.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Kondisi personil Dinas Sosial Kabupaten Mamuju sudah memadai untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal, tetapi masih kurang tenaga pelaksana atau staf. Setiap bidang telah memiliki tenaga pelaksana, seperti bidang rehabilitasi sosial dengan 4 tenaga pelaksana untuk 3 seksi yang menangani berbagai permasalahan sosial. Namun, kekurangan staf menyebabkan kendala saat penanganan kasus di lapangan. Selain itu, masih

dibutuhkan tenaga pelaksana dengan latar belakang pendidikan di bidang kesejahteraan sosial dan IT.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Berisi ringkasan hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya

3.1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 Kabupaten Mamuju berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan status kinerja kategori Sedang

3.2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 09.A/LHP/XIX.MAM/05/2024 Tanggal 14 Mei 2024 Kabupaten berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju hasil audit BPK Tahun 2024 Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Mamuju sebesar Rp1.251.196.419.550,00 atau tercapai 95,59 persen

Rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

4.1. Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	97.503.880.661,00	91.256.590.772,43	93,59
2	Pendapatan Transfer	1.107.363.999.240,00	1.097.102.110.527,00	99,07
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.000.000.000,00	16.704.519.461,00	87,92
Jumlah		1.223.867.879.901,00	1.205.063.220.760,43	98,37

4.2. Belanja

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Operasi			
1 Belanja Pegawai	507.217.608.348,00	499.773.175.745,00	98,53
2 Belanja Barang	352.458.254.362,00	334.668.676.181,00	94,95

Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Jasa			
3	Belanja Hibah	56.786.607.666,00	55.546.320.724,00	97,82
4	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	570.000.000,00	95,00
Jumlah Belanja Operasi		917.062.470.376,00	890.558.172.650,00	97,11
Belanja Modal				
1	Belanja Modal Tanah	386.405.000,00	22.065.760,00	5,71
2	Belanja Modal Peralatan Mesin	43.453.127.953,00	39.344.374.182,00	90,54
3	Belanja Modal Gedung Bangunan	112.104.938.683,00	88.727.406.636,00	79,15
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi Jaringan	76.745.799.180,00	74.435.307.687,00	96,99
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.429.375.000,00	1.429.190.000,00	99,99
6	Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Jumlah Belanja Modal		234.129.645.816,00	203.968.344.265,00	87,12
Belanja Tak Terduga				
1	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	175.006.800,00	35,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		500.000.000,00	175.006.800,00	35,00
Transfer Bantuan Keuangan				
1	Bagi Hasil	5.015.345.017,00	4.294.845.635,00	85,63
2	Bantuan Keuangan	152.248.533.138,00	152.200.050.200,00	99,97
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		157.263.878.155,00	156.494.895.835,00	98,75
Jumlah Belanja dan Transfer Daerah		1.308.955.994.347,00	1.251.196.419.550,00	95,59

5. INOVASI DAERAH

Berisi ringkasan inventarisasi berbagai inovasi daerah yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang telah dilakukan dan masih berjalan pada tahun pelaporan berdasarkan Database Inovasi Daerah. Dapat pula memasukkan Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
1	LARIS MANIS (Layanan Rehabilitasi Sosial Anak Melalui Assesment dan Pendampingan Terintegrasi)	Rangkaian kegiatan Inovasi “ LARIS MANIS “ (Layana Rehabilitasi Sosial Anak Melalui Assesmen dan Pendampingan Terintegrasi) Dinas Sosial yang menangani kegiatan tersebut dan telah melaksanakan ilayanan Rehabilitasi Sosial kami melayani Anak Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Anak Korban Bencana, Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban Narkotika dan zat Adiktif lainnya, serta telah melakukan Assesment, Respon Kasus, Pendampingan, Pemberian Bantuan Permakanan (sembako) maupun fasilitasi layanan Pendidikan dan kesehatan dasar, serta monitoring dan evaluasi.	Dinas Sosial
2	SIAP BERKOBAR (Asistensi APBDES Berbasis Kolaborasi)	Siap Berkobar adalah salah satu bentuk Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju dalam melakukan tugas Pembinaan Perencanaan Pembangunan kepada Pemerintah Desa dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan Asistensi APBDes	Dinas Pemberdayaan masyarakat desa
3	GADIS PAK RAHMAN (Gerakan Distribusi Pangan Pokok Murah & Aman)	Inovasi Gerakan Disitribusi Pangan Pokok Murah & Aman (Gadis Pak Rahman), adalah salah satu langkah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok yang bertujuan agar mudah dijangkau oleh masyarakat kalangan bawah dengan harga yang lebih murah yang disebabkan kurangnya jumlah pasokan dan tingginya permintaan pasar, sangat berpengaruh pada stabilisasi harga pangan.	Ketahanan Pangan
4	JEBOL UMKM (Jemput Bola Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	Program inovasi yang dikembangkan oleh DMPTSP Mamuju dengan mengunjungi langsung para pelaku UMKM di tempat usahanya dan membantu menerbitkan NIB secara gratis ditempat usaha masing masing	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
5	MAMUJU BERGEMASS (Mamuju Bergerak Bersama Masyarakat Gapai Air Bersih & Sanitasi Sehat)	Inovasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi sehat masyarakat melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat di setiap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Inovasi ini dilakukan untuk mendukung pembangunan sarana yang dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat	Pekerjaan umum dan penataan ruang
6	Inventarisasi Barang Milik Daerah Berbasis QR Code (Inter Code)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah melalui penggunaan QR Code dalam menginventarisir Barang Milik Daerah	Inspektorat Daerah
7	GERAKAN MASYARAKAT ANGGATANGKU SEHAT KEREN (GERMAS ASEK)	Berupa forum yang bergerak pada usaha peningkatan kesehatan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk seperti sosialisasi dan edukasi hidup sehat, pemeriksaan rutin penyakit menular, dan upaya pergerakan masyarakat untuk meningkatkan aktifitas fisik juga konsumsi makanan bergizi	Dinas Kesehatan
8	Elektronifikasi E-NPWPD (Termasuk didalamnya NPWPD, Payment Management System, BPHTB Online, Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah)	E-NPWPD adalah layanan elektronik yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, dalam Pengintegrasian data pajak daerah berbasis Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dengan beberapa jenis layanan pajak seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) melalui laman http://bapenda.mamujukab.go.id/	Badan Pendapatan Daerah
9	LOPIS (Layanan Online Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Aplikasi atau Website layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mamuju, sebuah layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang memudahkan masyarakat Kabupaten Mamuju melakukan pengurusan layanan administrasi kependudukan secara online melalui laman http://lopis.dukcapil.mamujukab.go.id/	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil

6. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan ikhtisar dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2024, yang telah disampaikan kepada Presiden

Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri pada bulan Maret 2024. Laporan ini kemudian dievaluasi secara nasional melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) guna mengukur capaian kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamuju tahun 2024 telah berjalan dengan baik, sebagaimana tercermin dari berbagai capaian pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen, kerja keras, serta sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung berbagai program dan kebijakan yang telah dicanangkan.

Namun, kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari seluruh pihak dalam memberikan masukan dan saran konstruktif guna menyempurnakan strategi pembangunan serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung pembangunan Kabupaten Mamuju. Semoga sinergi yang telah terjalin ini terus diperkuat demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Mamuju, 27 Maret 2025



BUPATI MAMUJU

Dr. Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, SH.,M.Si

PANTAI MANAKARRA



**PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU**

 www.mamujukab.go.id

 (0426) 2324500